

Literasi Digital dalam Masyarakat Multikultur

Oleh: Taufiqur Rahman

We are not sharing a global culture. Rather, we are learning the culture of sharing our global diversity (Manuel Castells)

Salah satu harapan dari hadirnya teknologi internet adalah kemampuannya untuk menyediakan sarana demokratis dalam mengekspresikan identitas individu ataupun identitas kolektif. Wajah demokratis internet dapat dilihat dari karakternya yang cenderung desentralistis, anonim dan memiliki daya tahan yang tinggi (Klotz, 2004). Di negara yang demokratis, internet memiliki peran yang strategis karena kemampuannya untuk menyediakan outlet yang efisien sebagai pendukung media komunikasi yang lain. Di negara yang cenderung otoriter, internet berperan menjadi media alternatif untuk melawan dominasi ruang publik oleh penguasa. Internet secara umum memiliki kelebihan dibanding media konvensional dengan kemampuannya untuk menghadirkan pertukaran informasi yang lebih interaktif, memfasilitasi komunikasi vertikal dan horizontal, proses komunikasi yang relatif tidak termediasi, biaya yang murah, kecepatan komunikasi yang tinggi, serta minimnya batas dan sensor (Hague & Loader, 1999; Bentivegna, 2006; Jenkins et al., 2009; Harper, 2011)

Potensi keramahtamahan (*conviviality*) yang dihadirkan oleh internet semakin terasa disaat teknologi yang berkembang semakin mengarah pada keleluasaan pengguna untuk mencipta, memodifikasi dan berbagi konten informasi sesuai dengan selera masing-masing (*user generated content*). Budaya partisipasi dapat dimaknai sebagai budaya yang membuat setiap kontribusi individu memiliki makna, memungkinkan hambatan yang kecil untuk ekspresi artistik dan keterlibatan sipil, dukungan yang kuat untuk mencipta dan berbagi karya cipta serta kesempatan *mentorship* bagi pendatang baru untuk belajar kepada yang lebih berpengalaman (Jenkins et al., 2009). Budaya partisipasi juga berkontribusi mendorong munculnya keberagaman yang selama ini tersembunyi di ruang privat untuk muncul ke ruang publik. Globalisasi informasi di era digital telah membuat masyarakat multikultur itu menjadi sebuah keniscayaan dan tidak lagi menjadi fenomena unik di beberapa tempat saja. Sebagaimana kutipan dari pernyataan Manuel Castells (2010: xxxvi)

di awal tulisan ini bahwa globalisasi tidak melahirkan budaya global tetapi justru menuntut kita untuk belajar berbagi dan menerima keberagaman secara terbuka di ruang publik.

Kehadiran internet juga melahirkan era komunikasi baru yang oleh Manuel Castells (2013) disebut sebagai era komunikasi massa individual (*mass-self communication*). Penyampaian informasi di internet dapat dikategorikan sebagai kegiatan komunikasi massa karena kegiatan ini berpotensi untuk menjangkau audiens yang luas secara global seperti saat kita mengunggah video di Youtube, atau menyampaikan pesan melalui *mailing list* atau *group* di media sosial. Pada saat yang sama, pesan yang kita sampaikan melalui internet dapat disebut sebagai komunikasi individu karena pesan itu kita buat sendiri, kita juga yang memilih tipe audiens seperti apa yang hendak dituju dan sebagai audiens kita juga dapat secara selektif memilih pesan yang akan kita akses. Kelahiran era baru komunikasi massa individual ini menghadirkan beberapa tantangan yang harus diantisipasi untuk membangun budaya komunikasi yang berkeadaban.

Euforia budaya partisipasi

Pada awal berkembangnya internet, potensi partisipasi ini belum banyak dirasakan. Pengguna internet generasi awal masih cenderung terbiasa dengan budaya penerimaan pasif di era media massa sehingga belum menyadari potensi untuk menjadi partisipan aktif di media baru ini. Pengenalan aplikasi seperti weblogs, micro blog dan bentuk media sosial yang lain yang semakin ramah bagi pengguna dan memungkinkan pengguna untuk lebih berperan dalam pembuatan konten sangat mendukung lahirnya budaya partisipasi dalam pemanfaatan internet. Perkembangan teknologi internet melahirkan transisi dari budaya penerimaan pasif di era media massa pada akhir abad ke-20 menjadi budaya partisipasi aktif di awal abad ke-21 (Flew, 2009).

Transisi budaya ini dalam prakteknya memunculkan euforia bagi pengguna internet sehingga banyak pengguna internet yang terjebak pada konsep kebebasan yang tidak tepat. Kebebasan berekspresi yang seharusnya dimanfaatkan secara bertanggung jawab, seringkali berubah menjadi kebebasan untuk membenci dan kebebasan untuk mendistorsi

informasi (Lim, 2017). Kebebasan untuk melakukan kritik dapat berubah menjadi ujaran kebencian atau pelintiran kebencian (George, 2017).

Pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia yang sangat tinggi telah berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan budaya partisipasi dalam penggunaan internet dan tumbuhnya suatu bentuk ‘koneksi sosial’ baru di dunia virtual (Jenkins et al 2009). Koneksi sosial ini terbangun melalui interaksi yang dibangun melalui publik yang berjejaring (*networked publics*) sebagaimana didefinisikan oleh danah boyd (2011). Interaksi pengguna internet melalui akun media sosial masing-masing telah menciptakan publik yang berjejaring, terutama dengan adanya fitur seperti profil, daftar teman, ruang komentar dan update informasi terkini (boyd, 2011: 43). Beberapa platform media sosial populer seperti Facebook, Twitter dan Instagram menawarkan fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk membangun koneksi sosial dan membangun komunitas imajiner baru melampaui batas-batas geografis.

Komunitas-komunitas imajiner baru ini tercipta secara sadar maupun tidak sadar melalui proses personalisasi yang diciptakan dan difasilitasi oleh pembuat platform media sosial. Komunitas-komunitas ini seringkali dibangun dalam lingkaran pertemanan dan pengikut yang terbatas. Fenomena koneksi sosial terbatas yang dibangun oleh komunitas-komunitas ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya alienasi sosial karena munculnya tendensi kuat dalam menyaring informasi secara selektif dan menciptakan gelembung penyaring (*filter bubble*) atau daerah kantong algoritmik (*algorithmic enclave*) dalam suatu jaringan tertentu yang membuat tidak memungkinkan masuknya informasi dan opini yang bertentangan dengan pandangan sebagian besar anggota jaringan (Pariser, 2011; Lim, 2017).

Urgensi pengembangan literasi digital

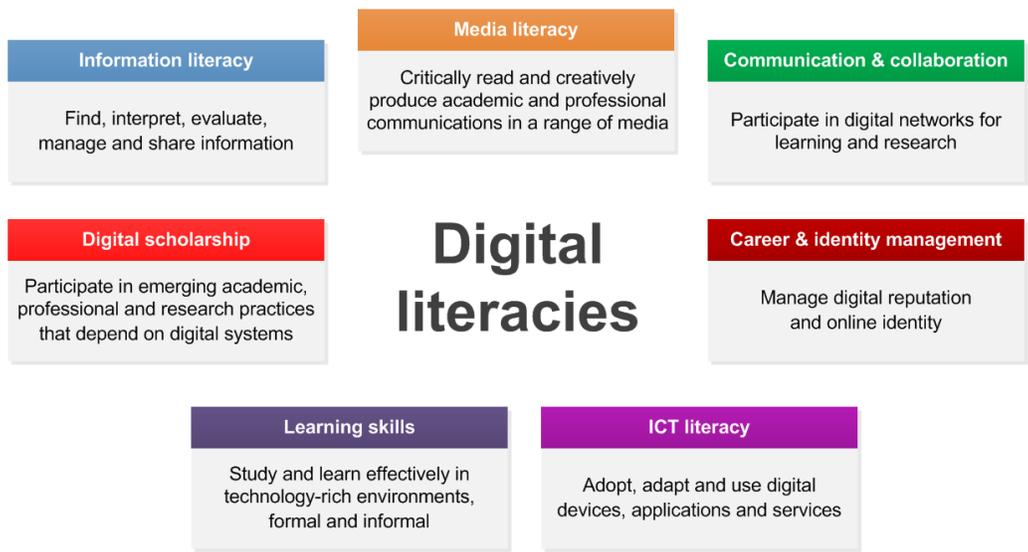
Literasi digital menjadi kata kunci dalam upaya membangun komunikasi yang berkeadaban di era digital. Konsep literasi digital dapat dimaknai secara beragam, tetapi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat hidup, belajar dan bekerja dalam lingkungan masyarakat digital (*those*

capabilities which fit an individual for living, learning and working in a digital society) (JISC, 2014). UNESCO membuat rumusan definisi literasi digital secara lebih spesifik sebagai kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan membuat informasi secara aman dan layak melalui perangkat digital dan teknologi berjejaring sebagai wujud partisipasi dalam bidang ekonomi dan kehidupan sosial (*Digital literacy is the ability to access, manage, understand, integrate, communicate, evaluate and create information safely and appropriately through digital devices and networked technologies for participation in economic and social life*) (UNESCO, 2018). Definisi yang dikemukakan diatas menggambarkan betapa luasnya cakupan dari literasi digital (*digital literacies*) atau istilah baru yang saat ini lebih sering dipakai yaitu kompetensi digital (*digital competences*) yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk dapat menjalani hidup dengan baik di era digital.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membuat rumusan yang sistematis untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam literasi/kompetensi digital yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat digital. Salah satu upaya pengembangan kerangka literasi digital yang komprehensif dilakukan oleh Joint Research Centre Uni Eropa yang mengembangkan konsep DigComp (Digital Competence Framework for Citizens). Kajian dan pengembangan kerangka ini telah dimulai sejak tahun 2005 dan terus diperbaharui sampai sekarang. Dalam kerangka ini diidentifikasi 21 jenis kompetensi digital yang dikelompokkan dalam 5 area kompetensi yang harus dimiliki oleh individu dalam masyarakat digital yaitu: 1) Literasi informasi dan data; 2) Komunikasi dan kolaborasi; 3) Penciptaan konten digital; 4) Keselamatan; dan 5) Pemecahan masalah sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Competence area	Competences
1. Information and data literacy	1.1 Browsing, searching and filtering data, information and digital content 1.2 Evaluating data, information and digital content 1.3 Managing data, information and digital content
2. Communication and collaboration	2.1 Interacting through digital technologies 2.2 Sharing through digital technologies 2.3 Engaging in citizenship through digital technologies 2.4 Collaborating through digital technologies 2.5 Netiquette 2.6 Managing digital identity
3. Digital content creation	3.1 Developing digital content 3.2 Integrating and re-elaborating digital content 3.3 Copyright and licenses 3.4 Programming
4. Safety	4.1 Protecting devices 4.2 Protecting personal data and privacy 4.3 Protecting health and well-being 4.4 Protecting the environment
5. Problem solving	5.1 Solving technical problems 5.2 Identifying needs and technological responses 5.3 Creatively using digital technologies 5.4 Identifying digital competence gaps

Kompetensi-kompetensi yang sudah diidentifikasi tersebut kemudian dibagi lagi tingkat penguasaannya dalam 8 level kemampuan dari level pemula sampai level spesialis tinggi (Carretero dkk, 2017). Kerangka lain misalnya yang dikembangkan oleh JISC (2014), sebuah lembaga swadaya masyarakat di Inggris dengan mengidentifikasi 7 elemen penting dari literasi digital yaitu literasi media, literasi informasi, komunikasi dan kolaborasi, keilmuan digital, manajemen karir dan identitas, keterampilan belajar serta literasi teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Upaya untuk mengembangkan kerangka literasi digital di Indonesia juga sudah dilakukan dan perlu diapresiasi meskipun belum komprehensif. Misalnya ada kerangka literasi digital yang dikembangkan oleh ICT Watch dengan fokus pada 3 aspek literasi digital yaitu proteksi, hak-hak dan pemberdayaan. Aspek proteksi meliputi perlindungan data pribadi, keamanan daring dan privasi individu. Aspek hak-hak meliputi kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual dan aktivisme sosial. Sedangkan aspek pemberdayaan meliputi jurnalisme warga, kewirausahaan dan etika informasi (ICT Watch, 2017).



Upaya yang lebih serius untuk mengembangkan kerangka literasi digital di Indonesia masih sangat dibutuhkan sebagai ikhtiar untuk membangun masyarakat digital yang berkeadaban. Gerakan literasi digital yang sudah dicanangkan tahun 2017 serta berbagai inisiatif yang sudah dijalankan oleh berbagai elemen masyarakat dalam menggerakkan literasi digital harus diikuti dengan upaya yang lebih sistematis dalam menyusun kerangka literasi digital yang komprehensif dan terukur untuk meningkatkan kualitas literasi digital masyarakat Indonesia.

Referensi

- Bentivegna, S. (2006). Rethinking politics in the world of ICTs. *European Journal of Communication*. 21(3).
- boyd, d. (2011). Social network sites as networked publics: Affordances, dynamics, and implications. In Z. Papacharissi (Ed) *Networked self: identity, community, and culture on social network sites*. New York: Routledge, pp. 39 – 58.
- Carretero, S., Vourikari, R. and Punie, I. (2017). *DigComp 2.1 the digital competence framework for citizens: with eight proficiency levels and examples of use*. Luxembourg: European Union.
- Castells, M. (2010). *The power of identity*, Chichester, England: Wiley-Blackwell.
- Castells, M. (2013). *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
- ICT Watch. (2017). *Kerangka literasi digital Indonesia*.
<http://litasidigital.id/books/kerangka-literasi-digital-indonesia/>
- Flew, T. (2009). Democracy, participation and convergent media: Case studies in contemporary online news journalism in Australia. *Communication, Politics & Culture*, 42 (2), 87--115.
- Gaorge, C. (2017). *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. Ihsan Ali Fauzi dan Irsyad Rafsadie (penyunting). Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Hague, B.N., & Loader, B.D. (1999). *Digital democracy: Discourse and decision making in the information age*. Hoboken: Taylor and Francis.
- Harper, T. (2011). *Democracy in the age of new media: The politics of the spectacle*. New York: Peter Lang.
- Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K. & Robinson, A.J. (2009). *Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century*. Cambridge: The MIT Press.
- Joint Information Systems Committee. (2014). *Developing Digital Literacies*.
<https://www.jisc.ac.uk/guides/developing-digital-literacies>
- Klotz, R.J. (2004). *The politics of internet communication*. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers Inc.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia, *Critical Asian Studies*, 49:3, 411-427.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. London: Penguin Books.
- UNESCO Institute for Statistics. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2*. Information Paper No. 51.
<http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf>